Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

DKI Berupaya Mengurangi Defisit dengan Menghemat Anggaran

Meski pemerintah sudah memangkas sejumlah pos pengeluaran, total anggaran belanja tahu ini diprediksi tetap defisit.

Fransisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah penghematan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Salah satu kebijakan yang diambil adalah mengurangi pengoperasian lampu penerangan jalan umum di Ibu Kota sejak 6 Mei lalu.

"Secara bertahap (pengurangan) akan dilakukan karena aktivitas pengguna jalan pada malam hari intensitasnya sudah berkurang," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, akhir pekan lalu.

Menurut Hari, pengurangan pengoperasian lampu penerangan jalan ini akan dibatasi hingga 60 persen. Ia mengklaim kebijakan tersebut dapat mengurangi biaya tagihan yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta. "Rencananya (pengurangan lampu jalan ini) sampai selesainya masa PSBB," ujar Hari.

Pemerintah DKI Jakarta sudah menghadapi masalah anggaran sejak Gubernur Anies Baswedan membatasi aktivitas masyarakat pada pertengahan Maret 2020. Beban itu semakin bertambah setelah Jakarta menerapkan PSBB hingga hari ini. Sebab, selama masa PSBB, kegiatan perekonomian melambat, bahkan nyaris berhenti.

Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan pendapatan DKI Jakarta dari sektor pajak diprediksi terjun bebas dari Rp 87,95 triliun menjadi Rp 47 triliun. Meski pemerintah sudah memangkas sejumlah pos pengeluaran, total belanja tahun ini diprediksi mencapai Rp 51 triliun. "Jadi, masih defisit sekitar Rp 4 triliun," kata Catur.

Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kepulauan Seribu, Devi Riana Sumanthi, mengatakan program pangan murah bagi warga di Kepulauan Seribu selama pandemi Covid-19 akan dihentikan sementara. Itu digelar untuk 5.400 warga Kepulauan Seribu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu lanjut usia, dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.

Menurut Devi, program pangan murah juga berlawanan dengan peraturan masa PSBB yang melarang kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat berkerumun. Sejauh ini bantuan sosial untuk masyarakat di Kepulauan Seribu selama PSBB juga terus mengalir. «Pasokan bahan kebutuhan pokok di Pulau Tidung Kecil dan pulau-pulau permukiman juga terpantau aman," kata Devi. "Setelah kondisi normal, kami akan lanjutkan lagi program pangan murah di Kepulauan Seribu.»

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, menilai target realisasi pendapatan Ibu Kota yang turun 53,66 persen menjadi Rp 47,18 triliun masih realistis untuk dicapai di tengah masa pandemi. Selain penghematan belanja oleh tiap satuan kerja perangkat daerah, menurut dia, Pemprov DKI masih memiliki ruang untuk menghadapi pelemahan pendapatan melalui penyesuaian proyeksi APBD 2020.

"Rapat secara maraton akan digelar mulai Senin (hari ini). Insya Allah, kami akan selesai bulan (Mei) ini," kata Taufik.

:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

DKI Berupaya Mengurangi Defisit dengan Menghemat Anggaran

Bisa Dipangkas

PEMERINTAH Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan membahas penyesuaian proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 yang diprediksi memangkas pendapatan hingga Rp 47 triliun dan belanja Rp 51 triliun. Berdasarkan kajian lembaga swadaya masyarakat pemerhati anggaran, Indonesia Budget Center, pemerintah DKI Jakarta sebenarnya bisa menghemat Rp 11 triliun dari sejumlah pos anggaran yang kurang penting.

A. Komponen Belanja Barang sebesar Rp 7,08 triliun

- Pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 420,61 miliar
- Perjalanan dinas ke luar daerah dan negeri sebesar Rp 117,4 miliar
- Pemotongan 30 persen komponen perjalanan dinas dalam daerah dari Rp 180 miliar atau setara dengan Rp 54 miliar
- Pemotongan 30 persen komponen belanja habis pakai dari Rp 1,84 triliun atau setara dengan Rp 551,4 miliar
- Pemotongan 30 persen komponen belanja kursus, sosialisasi, dan bimbingan bagi aparat sipil negara (ASN) dan non-ASN dari Rp 239 miliar atau setara dengan Rp 72 miliar
- Pemotongan 30 persen komponen belanja tenaga ahli atau narasumber dari Rp 894 miliar atau setara dengan Rp 268 miliar
- Pemotongan 30 persen komponen belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu dari Rp 8 miliar atau setara dengan Rp 2,4 miliar
- Pemotongan 30 persen komponen lomba atau festival dari 81,4 miliar atau sebesar Rp 24,5 miliar

B. Komponen Belanja Modal sebesar 3,6 triliun

- Modal penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 14,76 miliar
- Modal kantor lurah, sektor, dan suku dinas sebesar Rp 33,6 miliar
- Modal peralatan kantor sebesar Rp 196 miliar
- Pemeliharaan gedung dan kantor sebesar Rp 333 miliar
- dan sejumlah komponen lainnya

C. Komponen belanja bantuan keuangan sebesar Rp 282 miliar yang rencananya diperuntukkan bagi Pemerintah Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang. • FRANSISCO ROSARIANS